PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DAERAH OTONOMI BATAM

Titi Delima Panjaitan[*], Rufinus Hotmaulana Hutahuruk[**]
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

Abstract

Functional Autonomy is autonomy from the perspective of the budgeting function (areas to make money), from the economic sector, tourism, oceans, transportation, education, fisheries, infrastructure, needs to be strengthened institutionally, so that the main tasks and functions of the region become strong. . One of Batam's potentials is the development of the creative industry, so using the normative method an assessment is carried out on how the development and obstacles encountered in the creative economy in the Batam Autonomous Region and legal solutions can be offered.

Keywords: Autonomy, Batam, Industry, Economy

Abstrak

Otonomi Fungsional (*Functional Autonomy*) adalah otonomi dilihat dari perspektif fungsi budgeting (daerah mencari duit), dilihat dari sektor ekonomi, pariwisata, lautan, perhubungan, pendidikan, perikanan, insfrastruktur, perlu diperkuat adanya dengan institusional, sehingga tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat. Salah satu potensi Batam adalah pengembangan industri kreatif sehingga kemudian dengan menggunakan metode normatif dilakukan pengkajian terhadap bagaimana pengembangan dan hambatan yang ditemui dalam ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam serta solusi hukum yang dapat ditawarkan

Kata Kunci: Otonomi, Batam, Industri, Ekonomi

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Fungsional (*Functional Autonomy*) adalah otonomi dilihat dari perspektif fungsi *budgeting* (daerah mencari duit), dilihat dari sektor ekonomi, pariwisata, lautan, perhubungan, pendidikan, perikanan, insfrastruktur, perlu diperkuat adanya dengan institusional, sehingga tugas pokok dan fungsi daerah menjadi kuat.

Secara geografis, Kepulauan Riau adalah provinsi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berciri kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau, menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. Berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura

Salah satu potensi Batam adalah pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi kreatif dilakukan saat ini adalah:

1. Pengembangan 16 subsektor ekonomi yaitu kuliner, animasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi, dan

[*] Alamat korespondensi: 1852006.titi@uib.edu
[**] Alamat korespondensi: rufinushotmaulana@yahoo.com

video, fotografi, kriya (seni patung), musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Pada tanggal 24 Mei 2019, Pemko Batam dan Badan Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan potensi ekonomi kreatif Batam, di Gedung Kementerian BUMN Jakarta[1]. Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun. Ruang lingkupnya meliputi riset, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian infrastruktur, pemasaran, fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi, hubungan antar lembaga dan wilayah, ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif

2. Pengembangan ekonomi digital seperti pengembangan *startup*, *web*, aplikasi, program-program digital, film, dan animasi. Pada tanggal 8 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada acara *Annual Leaders Meeting di Delegation Room*, The Istana, Singapura, sepakat bekerja sama dibidang ekonomi, diantaranya adalah peningkatan investasi, perdagangan, ekonomi digital dan pendidikan vokasi [2].
3. Sosialisasi penerapan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam yaitu KEK Nongsa Digital Park oleh Kepala *ex-officio* Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi pada tanggal 2 Oktober 2019 di Hotel Harmoni One, Batam Center[3].

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam?
2. Apa kendala pengembangan ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam?
3. Apa solusi pengembangan ekonomi kreatif di daerah otonomi Batam?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah dimulai pada tahun 1999, dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diimplementasikan dalam sistem administrasi publik baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2004, kebijakan tersebut dievaluasi kembali dan direvisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No 32 Tahun 2004

[1] https://batampos.co.id/2019/05/25/iapkan-wadah-ekonomi-kreatif-bagi-milenial-pemko-batam-kerjasama-dengan-badan-ekonomi-kreati/

[2] https://kemenperin.go.id/artikel/21132/RI-Singapura-Pacu-Pengembangan-Kawasan-Industri-Kendal-dan-Nongsa-Digital-Park

[3] https://batam.tribunnews.com/2019/10/03/breakingnews-bahas-kek-kepala-bp-batam-rudi-kumpulkan-pengusaha-batam

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Definisi otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku[4]. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah[5]. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat[6]. UU Nomor 30 Tahun 2014 menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Otonomi Batam

Kemajuan teknologi dan ekonomi saat ini mengharuskan negara-negara berkembang untuk maju bersama dan mengejar ketertinggalannya. Pada pidato Presiden Joko Widodo disampaikan tujuan strategis pembangunan nasional adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. "SDM yang ingin dibangun adalah SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK", kebijakan ini adalah untuk, mempersiapkan *future leaders*,

[4] Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal 30

[5] Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal 32

[6] HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta, hal 133

akselerasi pengembangan karir, serta mewujudkan rencana suksesi[7]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi ekonomi kreatif menyumbang Rp1.105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018. Selain itu, juga menyerap tenaga kerja sebesar 17,69 juta atau 14,61 persen tenaga kerja nasional pada 2017. Ekonomi kreatif bersifat inklusif tanpa memandang latar belakang, usia, gender, lokasi geografis, maupun pendidikan. Bahkan kelompok disabilitas pun, dapat ambil bagian dalam sektor ini[8]. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah di wilayah Batam dilakukan oleh Pemko Batam. Otonomi daerah memberikan dampak positif dalam membangun kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Potensi Batam yang memiliki sumber daya alam dan manusia dan didukung secara geografis berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, tentunya akan memiliki kebermanfaatan yang maksimal apabila dikelola dengan baik. Penerapan otonomi daerah di Kota Batam diharapakan dapat menciptakan:

a. Kesejahteraan masyarakat
b. Pertumbuhan ekonomi
c. Lapangan kerja
d. Mengentaskan kemiskinan
e. Meningkatkan pendidikan
f. Meningkatkan kesehatan
g. Infrastruktur
h. Membuka keterisolasian pada pulau-pulau terpencil.

Dengan pengembangan industri kreatif tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang memadai tentunya akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran tentunya akan mengurangi permasalahan sosial. Jika masyarakatnya sudah produktif maka percepatan pembangunan menuju kemandirian akan lebih mudah untuk dilakukan. Subsektor industri kreatif seperti kuliner, animasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi, dan video, fotografi, kriya (seni patung), musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio adalah motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah daerah membimbing masyarakat dan memberikan program pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia[9]. Beberapa upaya pemerintah untuk pengembangan industri kreatif di Batam adalah

a. *Bekraf Developer Day* (BDD) yang difasilitasi Deputi Infrastruktur Bekraf untuk membangun ekosistem

[7] https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/manajemen-talenta-berpeluang-ciptakan-sdm-yang-dinamis-dan-terampil

[8] https://businesstoday.id/2019/10/18/bekraf-ekonomi-kreatif-jadi-akselerator-pengembangan-ekonomi-daerah/

[9] https://haluankepri.com/2019/05/26/wadah-ekonomi-kreatif-milenial-di-batam-disiapkan/

ekonomi digital subsektor aplikasi dan *game* agar dapat mendorong perkembangan industri aplikasi dan *game* Indonesia pada tanggal 24 Maret 2018[10].

b. Festival Pemuda Kreatif 2019 yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Festival Pemuda Kreatif 2019 di Batam diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Batam dan komunitas Generasi *Entrepreneur* (GEN) Batam pada tanggal 12 September 2019[11]. Kegiatan ini diramaikan *stand* kuliner, kriya, fashion dan IT yang bertujuan untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada generasi muda menunjukkan kreativitas dan inovasinya.

c. Sosialisasi platform BISMA (*BEKRAF Information System in Mobile Application*) kepada pelaku ekonomi kreatif di Batam pada tanggal 29 Agustus 2019[12]. BISMA sendiri merupakan platform bagi pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan diri maupun usahanya ke *database* resmi Bekraf. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas mengenai pengemasan produk, pemasaran produk, teknik fotografi komersil hingga pengelolaan keuangan

d. Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pelaku ekonomi kreatif memiliki HKI atas produk yang diproduksi pada tanggal 20 Juni 2019[13]. Program tahunan Bekraf ini menyasar pelaku UMKM yang tergabung dalam binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam serta pelaku ekonomi kreatif yang tergabung dalam komunitas di Kota Batam.

e. Penandatanganan MoU pengembangan desain dan manajemen marketing batik Batam antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Batam dan Universitas Internasional Batam (UIB)[14]. Batik Batam telah memproduksi beberapa motif yaitu batik gonggong, motif biota laut, abstrak dan yang sedang viral saat ini adalah batik ikan marlin. Kualitas para pengrajin juga

[10] https://www.bekraf.go.id/berita/page/8/batam-menjadi-kota-pertama-penyelenggaraan-bekraf-developer-day-di-tahun-2018

[11] https://www.wartakepri.co.id/2019/09/22/festival-kuliner-dan-fashion-pemuda-kreatif-batam-2019-sedot-perhatian-milenial/

[12] https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-sosialisasi-platform-bisma-ke-pelaku-ekraf-batam

[13] https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-targetkan-fasilitasi-pendaftaran-75-hki-di-batam

[14] https://mediacenter.batam.go.id/2019/10/23/tingkatkan-kualitas-batik-batam-dekranasda-jalin-kerja-sama-dengan-perguruan-tinggi/

ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan diadakannya berbagai pelatihan.

3. Kendala Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Otonomi Batam

Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Batam belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain[15]:

a. Masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik.
b. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresisasi terhadap kreativitas lokal.
c. Kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannnya sistem pembayaran *online*, dan rendahnya *monitoring* terhadap royalti, lisensi dan hak cipta.

Selain itu, ekonomi kreatif masih dihadapkan pada masalah SDM yang sebagian besar belajar secara otodidak, sehingga kualitasnya belum cukup merata. Berbagai kegiatan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah untuk mendorong ekonomi kreatif di Batam, belum optimal mendorong kesejahteraan masyarakat Batam. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mengakselarasi pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi.

4. Solusi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Otonomi Batam

Komitmen pemerintah dalam regulasi pengembangan ekonomi kreatif ini makin kuat dengan disahkannya UU Ekonomi Kreatif pada 26 September 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional tahun 2018-2025.

UU Ekonomi Kreatif tujuannya untuk menjadi tonggak penting kebangkitan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam UU Ekraf, tertuang poin yang menyebutkan bahwa hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual bisa menjadi jaminan kredit atau kolateral. Artinya, pelaku ekonomi kreatif bisa menggunakan hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan akses pelayanan dibidang keuangan, seperti kredit dari perbankan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor ekonomi kreatif, khususnya yang memang berskala kecil dan menengah. Perlu dukungan dari Bank Indonesia

[15] https://batamtoday.com/home/read/57998/Ekonomi-Kreatif-di-Kepri-Belum-Berkembang-Maksimal

(BI) dan OJK dalam menjabarkan UU Ekonomi Kreatif di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional (Rindekraf) juga sebagai kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang dan pedoman bagi pemerintah (pusat dan daerah) secara terintegrasi dan kolaboratif. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Peningkatan daya saing Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan ekonomi diharapkan mampu mengikuti tren global. Potensi ekonomi kreatif di Batam sebagai penyumbang devisa dan lapangan kerja didukung secara geografis berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, tentunya akan memiliki kebermanfaatan yang maksimal untuk mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan pengembangan industri kreatif tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menuntaskan kendala perizinan dan menawarkan lebih banyak insentif melalui UU Ekonomi Kreatif. Upaya pemerintah dalam pengembangan industri kreatif di Batam telah banyak dilakukan seperti *Bekraf Developer Day* (BDD) yang difasilitasi Deputi Infrastruktur Bekraf, Festival Pemuda Kreatif 2019 di Batam diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Batam dan komunitas Generasi *Entrepreneur* (GEN) Batam, Sosialisasi platform BISMA (BEKRAF *Information System in Mobile Application*) kepada pelaku Ekraf di Batam, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pelaku ekonomi kreatif pada pelaku UMKM yang tergabung dalam binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam serta pelaku ekonomi kreatif yang tergabung dalam komunitas di Kota Batam untuk memiliki HKI atas produk yang diproduksi, MoU pengembangan desain dan manajemen *marketing* batik Batam antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Batam dan Universitas Internasional Batam (UIB) dan upaya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aris. (2019). *Siapkan Wadah Ekonomi Kreatif bagi Milenial, Pemko Batam Kerjasama Dengan Badan Ekonomi Kreatif*. Batampos.Co.Id. https://batampos.co.id/2019/05/25/iapkan-wadah-ekonomi-kreatif-bagi-milenial-pemko-batam-kerjasama-dengan-badan-ekonomi-kretif/

Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.

Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). *Manajemen Talenta Berpeluang Ciptakan SDM yang Dinamis dan Terampil*. Menpan.Go.Id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/manajemen-talenta-berpeluang-ciptakan-sdm-yang-dinamis-dan-terampil

Indaryani, T. (2019). *BREAKINGNEWS - Bahas KEK, Kepala BP Batam Rudi Kumpulkan Pengusaha Batam*. TribunBatam.Id. https://batam.tribunnews.com/2019/10/03/breakingnews-bahas-kek-kepala-bp-batam-rudi-kumpulkan-pengusaha-batam

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *RI-Singapura Pacu Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Nongsa Digital Park*. Kemenperin.Go.Id. https://kemenperin.go.id/artikel/21132/RI-Singapura-Pacu-Pengembangan-Kawasan-Industri-Kendal-dan-Nongsa-Digital-Park

Media Center Batam. (2019). *Tingkatkan Kualitas Batik Batam, Dekranasda Jalin Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi*. Mediacenter.Batam.Go.Id. https://mediacenter.batam.go.id/2019/10/23/tingkatkan-kualitas-batik-batam-dekranasda-jalin-kerja-sama-dengan-perguruan-tinggi/

Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.

Surya. (2015). *Ekonomi Kreatif di Kepri Belum Berkembang Maksimal*. Batamtoday.Com. https://batamtoday.com/home/read/57998/Ekonomi-Kreatif-di-Kepri-Belum-Berkembang-Maksimal

Suwadha, D. (2019). *Festival Kuliner dan Fashion Pemuda Kreatif Batam 2019 Sedot Perhatian Milenial*. Wartakepri.Co.Id. https://www.wartakepri.co.id/2019/09/22/festival-kuliner-dan-fashion-pemuda-kreatif-batam-2019-sedot-perhatian-milenial/

Widjaja, H. A. W. (2004). *Otonomi Desa*. Rajawali Pers.